

STUDI KOMPARASI STRUKTUR KURIKULUM PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN DI TIGA PROVINSI KANADA (ONTARIO, SASKATCHEWAN, DAN BRITISH COLUMBIA)

Annisa Istiqomah

Jurusan PPKn, Program Pascasarjana, UNY, Jl. Colombo No.1, Depok, Caturtunggal
Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta 55281
annisa_istiqomah1992@yahoo.com

Abstrak

Masyarakat Kanada yang multikultural memberikan penekanan terhadap bentuk implementasi Pendidikan Kewarganegaraan yang kewenangan impelementasinya diserahkan padai tiap-tiap provinsi. Setiap provinsi di Kanada memiliki yurisdiksi berbeda dalam proses implementasi Pendidikan Kewarganegaraan. Konsepsi kewarganegaraan dan Pendidikan Kewarganegaraan menjadi dasar kebijakan dalam kurikulum sekolah negeri Kanada yang merujuk pada aktivis di setiap akhir studi. Terdapat perbedaan perspektif Pendidikan Kewarganegaraan pada masing-masing masyarakat dalam berbagai provinsi seperti Ontario, British Columbia, dan Saskatchewan. Hal ini disinyalir sebagai implikasi dari kebijakan otonomi daerah dalam melakukan urusan pendidikan. Pendidikan Kewarganegaraan di Kanada diintegrasikan dengan semua komponen studi sosial. Kebijakan kurikulum Pendidikan Kewarganegaraan menganggap bahwa warga Kanada yang baik adalah individu yang memiliki pengetahuan tentang masyarakat kontemporer dan isu-isu yang dihadapinya; bekerja menuju kebaikan bersama; mendukung pluralisme; dan terampil mengambil tindakan untuk membuat komunitas, bangsa, dan dunia mereka menjadi tempat yang lebih baik bagi semua orang.

Kata kunci : Pendidikan Kewarganegaraan, kurikulum, multikultural.

Abstract

Canadian multicultural society emphasizes the form of Citizenship Education implementation whose implementation authority is assigned to each province. Each province in Canada has different jurisdictions in the implementation process of Citizenship Education. Conceptions of citizenship and Citizenship Education form the basis of policy in Canada's state school curriculum referring to activists at the end of each study. There are different perspectives of Citizenship Education in each community in different provinces such as Ontario, British Columbia and Saskatchewan. This is allegedly an implication of the policy of regional autonomy in conducting education affairs. Citizenship Education in Canada is integrated with all components of social studies. The curriculum policy of Citizenship Education considers that good Canadians are individuals who have knowledge of contemporary society and the issues it faces; work towards the common good; support pluralism; and are skilled at taking action to make their community, nation, and world a better place for everyone.

Keywords: *Citizenship education, curriculum, multicultural*

PENDAHULUAN

Pendidikan Kewarganegaraan di Kanada menekankan pada aspek Pendidikan Kewarganegaraan Multikultural. Hal ini didasarkan pada realita tentang tingginya pluralitas di Kanada. Menurut Peterson et.al (2016: 348) Undang-undang Multikulturalisme membuat negara berusaha untuk mencapai “persamaan semua orang Kanada” di setiap aspek kewarganegaraan termasuk dimensi ekonomi, sosial, politik dan budaya, bahasa yang dipresentasikan oleh negara Kanada, baik dalam negeri maupun di tingkat dunia, berani dalam menjamin inklusivitas dan kesetaraan, multikulturalisme “fundamental” , mendorong harmonisasi rasial dan etnis, pemahaman lintas budaya, menghambat ghettoisasi, kebencian, diskriminasi dan kekerasan. Kanada mempertahankan komitmen signifikan untuk mendorong keragaman sebagai sebuah kebaikan sosial yang dilakukan bersamaan dengan membina kohesi sosial dan persatuan nasional yang tetap menjadi tantangan mendasar bagi Pendidikan Kewarganegaraan di negara Kanada (Banks, 2012: 294). Banks, Kmylica, dan Parker (Molina & Giron, 2016: 145) menyatakan bahwa Pendidikan Kewarganegaraan multikultural dimulai dengan pengakuan bahwa ciri khas komunitas politik adalah adanya beberapa bentuk perbedaan sosial dan budaya seperti ras, etnis, gender, orientasi budaya dan agama, serta preferensi seksual.

Pendidikan kewarganegaraan yang menegaskan keragaman, dalam praktiknya hanya mengajarkan siswa tentang keragaman internal bangsa dan mempromosikan toleransi untuk praktik dan kepercayaan yang berbeda dari kebiasaan. Ajaran semacam itu gagal memenuhi persamaan sipil dan politik Pendidikan Kewarganegaraan yang berkaitan dengan kesetaraan warga dan politik dalam mengakui ketidakadilan historis yang dialami oleh kaum minoritas dan mengajarkan kompleksitas, dilema, dan tantangan hidup di masyarakat multikultural. Konteks historis dan kontemporer mengenai keadilan sosial menunjukkan implikasi penting bagi Pendidikan Kewarganegaraan. Hebert (2009: 14) menyatakan bahwa mandat kurikulum dalam ilmu sosial dan kewarganegaraan, di berbagai provinsi di Kanada, baru-baru ini telah meningkatkan penekanannya pada kewarganegaraan aktif dan bertanggung jawab. Hal ini sebagai tanggapan atas lambannya jumlah pemilih yang rendah dan fenomena pemuda yang melepaskan diri dari politik formal secara meluas. Beberapa ilmuwan menegaskan hal tersebut sebagai reformasi demokrasi yang menjanjikan akan memberikan banyak kesempatan untuk mengembangkan pemahaman baru tentang Pendidikan Kewarganegaraan sebagai tanggung jawab, deliberatif dan partisipatif (Hebert 2009: 14). Pendapat lain dari Bickmore (2014: 260) menyatakan bahwa pemahaman baru tentang Pendidikan Kewarganegaraan di Kanada memperkuat dominasi ideologi individualis neoliberal yang berkelanjutan, menurunkan nilai tindakan kolektif dan aktivitas relasional di lingkungan rumah dan pekerjaan masyarakat pada ranah pribadi.

Menurut Peterson et al. (2016: 360) pemerintahan parlementer pusat di ibu kota negara bagian “Ottawa” yang berada di provinsi Ontario, mengelola seluruh kewarganegaraan yang luas sesuai dengan kekuasaan yang ditetapkan. Dengan tunduk pada otoritas pusat ini, kekuatan pemerintahan lainnya sesuai dengan wilayah tertentu terletak pada provinsi dan wilayah Kanada. Provinsi memiliki otoritas pengawas khusus mengenai pendidikan, pekerjaan, perawatan kesehatan, bahasa dan tempat tinggal. Kennelly & Llewellyn (2011: 792) menganalisis mandat baru dalam mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan di Provinsi Alberta, British Columbia dan Ontario yang diinterpretasikan melalui bentuk kewarganegaraan aktif, termasuk asumsi mengenai nilai kewarganegaraan gender seperti rasionaitas atau kepedulian otonom. Menurut Kennelly dan Llewellyn pembelajaran kewarganegaraan aktif memberikan pengajaran mengenai pentingnya perilaku yang sesuai (etika, tugas, dan tanggung jawab) dan menutup perilaku partisipasi yang tidak pantas dalam perbedaan pendapat di masyarakat. Kebijakan kurikulum baru dalam Pendidikan Kewarganegaraan mendorong individu untuk mengatur dirinya sendiri dan bertanggung jawab kepada negara, daripada menekankan pentingnya hak, perbedaan pendapat atau tindakan kewarganegaraan.

Penelitian terhadap praktik guru di kelas menunjukkan bahwa dalam pedoman resmi, guru memiliki otonomi yang cukup luas untuk menafsirkan kurikulum yang akan mereka terapkan dengan beragam cara, termasuk perspektif tentang politik kritis (mainstream). Pada tingkat sekunder maupun tingkat dasar, guru cenderung menekankan tanggung jawab pribadi daripada keterlibatan politik (Faden, 2012:10). Studi kasus Llewellyn et. al (2010: 792) di empat sekolah Ontario menemukan bahwa Pendidikan Kewarganegaraan sebagai mata pelajaran yang membosankan. Hal ini karena Pendidikan Kewarganegaraan menekankan pada pentingnya pengetahuan prosedural dan kepatuhan yang jarang memeriksa isu terkini. Gibson (2012:44) melakukan pengamatan dan mewawancara 10 guru SD dan 10 murid pada tahun 2005. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa para guru merasa tidak nyaman dengan sebagian besar konten yang dianjurkan dan penekanan baru kurikulum pada pengembangan keterampilan dan penyelidikan. Selanjutnya, Gibson tidak menemukan bukti bahwa guru atau siswa tersebut memahami tujuan pendidikan kewarganegaraan demokratis dari studi sosial.

Studi kualitatif yang dilakukan Tupper & Cappello (2012:53) di dua sekolah menengah di Regina, Saskatchewan, mengajak siswa untuk membuat dan menjelaskan gambar visual yang menggambarkan persepsi mereka tentang kewarganegaraan yang baik. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa sebagian besar siswa yang terdiri dari berbagai latar belakang ini, mengemukakan gagasan kewarganegaraan mainstream seperti kebanggaan nasional, wacana multikulturalisme resmi dan kepedulian terhadap lingkungan, keluarga dan tetangga. Dengan

demikian, kaum muda ini memahami kewarganegaraan secara individual daripada persyaratan sosial atau politik, dan tampaknya menganggap bahwa demokrasi dan keadilan sosial telah direalisasikan. Bagi para siswa ini, kewarganegaraan 'baik' (multikultural) berkomitmen pada gagasan kewarganegaraan universal, yang tidak mencakup pengalaman rasisme. Tupper & Cappello menyimpulkan bahwa kegagalan untuk menganalisa atau mengkritik hubungan multikultural akan memperkuat *status quo* yang jelas tidak sempurna. Tupper et.al (2010: 337) meneliti konsepsi kewarganegaraan dan niat siswa di dua sekolah menengah Saskatchewan, satu dengan populasi kulit putih kaya raya, satu dengan populasi kelas pekerja yang beragam termasuk banyak siswa asli. Intinya semua siswa di kedua sekolah tersebut mengartikulasikan pengertian liberal yang sama tentang kewarganegaraan universal pada tingkat abstrak. Namun, siswa di komunitas ras campuran yang bercorak rasial (berbeda dengan komunitas kaya dan makmur) mengalami keterputusasaan dari pengalaman hidup mereka, dan tidak membayangkan diri mereka benar-benar menjadi warga negara yang diberdayakan tersebut.

Dokumen kebijakan kurikulum sosial dan kewarganegaraan Kanada menghadirkan gambaran masyarakat Kanada dan kewarganegaraan yang semakin bernuansa, bukan narasi sederhana tentang sejarah politik nasionalistik, walaupun pada umumnya mereka menanamkan asumsi liberalis individualis. Kurikulum ini semakin menekankan pengembangan ketrampilan dan banyak perspektif siswa, serta secara langsung mengajarkan kewarganegaraan dan menegaskan kewarganegaraan 'aktif'. Namun, bukti dari berbagai penelitian guru dan siswa di sekolah menunjukkan bahwa praktik kurikulum Kanada sering mencerminkan versi kewarganegaraan yang lebih tua dan kurang berorientasi demokrasi, menilai bahwa pendidikan ini tampaknya tidak mengilhami siswa baik kesadaran kritis maupun niat untuk berpartisipasi. Uraian di atas menunjukkan bahwa terdapat perbedaan perspektif Pendidikan Kewarganegaraan multikultural pada masing-masing masyarakat dalam berbagai provinsi seperti Ontario, British Columbia, dan Saskatchewan yang dinilai sebagai implikasi dari kebijakan otonomi daerah dalam bidang pendidikan

Kajian Pustaka

Pada awalnya tujuan, isi dan pedagogi Pendidikan Kewarganegaraan di Kanada belum ditentukan sehubungan dengan perdebatan kewarganegaraan yang tak berkesudahan. Marker & Mehlinger (1992: 835) menyatakan bahwa konsep kewarganegaraan mengandung unsur yang sama yaitu "pengetahuan, keterampilan, nilai, dan partisipasi" tetapi ada banyak ketidaksepakatan mengenai peran, sifat, dan kepentingan relatif masing-masing elemen. Menurut Connolly (1974: 24) perselisihan tentang kewarganegaraan timbul bukan hanya karena konsep internal yang kompleks, tetapi juga karena terdapat hubungan yang normatif. Hughes (1996: 127) berpendapat bahwa

mereka yang berbicara tentang Pendidikan Kewarganegaraan tidak begitu peduli dengan definisi hukum kewarganegaraan yang sempit seperti beberapa rasa normatif tentang kewarganegaraan yang baik. Kesalahpahaman sering muncul dalam diskusi tentang pendidikan kewarganegaraan antara kaum ekstrem elitisme dan aktivisme radikal (Smith & Ennis, 1961: 200). Oleh karena itu pemahaman yang berbeda tentang sifat kewarganegaraan yang baik berimplikasi pada konsepsi Pendidikan Kewarganegaraan yang berbeda pula. Menurut Bull (2008 : 450) perdebatan dualitas yang bertentangan ini dalam kurikulum tidak hanya diperlukan, tetapi berkenan karena mereka "menyediakan orang-orang kaya dan memuaskan kehidupan atau pendidikan kewarganegaraan yang menarik.

Livingstone (2015: 45-46) memberikan penekanan tentang pentingnya pendidikan kewarganegaraan dalam pemerintahan yang bertanggung jawab di Kanada dengan penanaman pendidikan liberal. Selanjutnya untuk mengisi kesenjangan ini, sekelompok peneliti yang tertarik, para pengambil keputusan dan praktisi bertemu pada tahun 1998 dan mengembangkan konsensus seputar agenda penelitian *pan-Canadian* sebuah acara bersejarah dan unik di Kanada. Menurut Hebert & Sears (2001: 3) empat tema utama yang mengatur agenda penelitian *pan-Canadian* yaitu a) Model Kewarganegaraan, Tipologi Warga Negara dan Konteks Kewarganegaraan; b) Nilai dalam Pendidikan Kewarganegaraan; c) Perilaku, Sikap, Keterampilan dan Pengetahuan dalam Pendidikan Kewarganegaraan, dan; d) Kebijakan kurikulum pendidikan resmi yang condong pada konsepsi kewarganegaraan aktivis.

Secara tradisional Kanada memberikan perhatian terhadap pendidikan politik atau kewarganegaraan yang berada di tingkat sekolah dasar atau menengah. Menurut Bell & Lewis (2015: 158) Pendidikan Kewarganegaraan yang efektif dapat menjadi solusi kebijakan untuk masalah publik terhadap penurunan literasi kewarganegaraan dan partisipasi politik di Kanada di tengah krisis eksistensial lain untuk perguruan tinggi dan universitas. Studi pendidikan di Kanada menunjukkan bahwa pendidikan yang dikelola provinsi tetap memiliki tingkat kesamaan yang adil di seluruh sistem yang berbeda (Conley & Osborne, 1983: 65). Meskipun terdapat nuansa yang berbeda di yurisdiksi yang berbeda, namun semua konsepsi kewarganegaraan dan Pendidikan Kewarganegaraan yang menjadi dasar kebijakan dalam kurikulum sekolah negeri Kanada merujuk pada aktivis di akhir rangkaian. Secara resmi warga Kanada yang baik dipandang sebagai orang-orang yang memiliki pengetahuan tentang masyarakat kontemporer dan isu-isu yang dihadapinya; bekerja menuju kebaikan bersama; mendukung pluralisme; dan terampil mengambil tindakan untuk membuat komunitas, bangsa, dan dunia mereka menjadi tempat yang lebih baik bagi semua orang.

Secara tradisional, pengetahuan yang membentuk inti Pendidikan Kewarganegaraan di seluruh Kanada mengacu pada sejarah, geografi, ilmu sosial lainnya, ilmu perilaku dan humaniora" (Alberta

Education dalam Sears & Hughes, 1996: 130). Pendidikan kewarganegaraan bertujuan untuk mendorong kemampuan berpartisipasi dan kecenderungan untuk melakukannya tumbuh baru-baru ini dalam program pelayanan masyarakat. Hughes (1994: 21) menyatakan bahwa Pendidikan Kewarganegaraan dalam arti luas, melibatkan pembelajaran tentang pemerintah dan proses politik, serta memperoleh pengetahuan dan mengembangkan sikap dan keterampilan yang memungkinkan partisipasi efektif warga negara dalam masyarakat demokratis. Pendidikan kewarganegaraan diintegrasikan dengan semua komponen studi sosial lainnya. Analisis dokumen kebijakan tidak menentukan sejauh mana program yang digambarkan benar-benar membimbing praktik kelas. Sears & Parsons (1991: 18) mengemukakan bahwa "formalisme kelas bahasa Kanada dan hafalan belajar konten tradisional telah melemahkan pendekatan semacam itu".

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa meskipun setiap provinsi di Kanada memiliki yurisdiksi berbeda dalam proses implementasi Pendidikan Kewarganegaraan tetapi semua konsepsi kewarganegaraan dan Pendidikan Kewarganegaraan yang menjadi dasar kebijakan dalam kurikulum sekolah negeri Kanada merujuk pada aktivis di setiap akhir studi. Hampir semua kebijakan kurikulum Pendidikan Kewarganegaraan menganggap bahwa warga Kanada yang baik dipandang sebagai orang-orang yang memiliki pengetahuan tentang masyarakat kontemporer dan isu-isu yang dihadapinya; bekerja menuju kebaikan bersama; mendukung pluralisme; dan terampil mengambil tindakan untuk membuat komunitas, bangsa, dan dunia mereka menjadi tempat yang lebih baik bagi semua orang. Pendidikan Kewarganegaraan di Kanada pada umumnya diintegrasikan dengan semua komponen studi sosial lainnya. Kebijakan kurikulum memperjelas bahwa guru Ilmu Sosial di sekolah dasar diharapkan dapat menangani aspek-aspek ilmu politik serta sejarah, geografi dan ekonomi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Struktur Kurikulum Pendidikan Kewarganegaraan di Ontario.

Pendidikan Kewarganegaraan di Provinsi Ontario diperkenalkan pada bulan September 2000 sebagai mata pelajaran *statutory* yang harus diambil di kelas 10 (sekolah menengah). Provinsi menyatakan bahwa PKN kelas X melengkapi pemahaman siswa tentang peran individu dalam masyarakat dengan mengajarkan prinsip-prinsip dasar demokrasi dan kewarganegaraan yang bertanggung jawab. Menurut Davies & Issitt (2005: 397) pedoman kurikulum Ontario menjelaskan tiga alur utama Pendidikan kewarganegaraan: kewarganegaraan informasi; Kewarganegaraan terarah; dan, kewarganegaraan aktif. Beberapa dokumen yang dipublikasikan *Ontario Ministry of Education* (Sears & Hughes, 1996: 132) menekankan bahwa salah satu peran pendidikan

kewarganegaraan adalah membekali siswa untuk memahami dan mengelola perubahan, terutama dalam hal memahami dan menghargai peran yang dimainkan beragam budaya di negara Kanada.

Kurikulum berbasis standar diterapkan di Ontario, untuk pendidikan menengah yang dimulai pada bulan September 1999 untuk kelas 9, September 2000 untuk kelas 10, September 2001 untuk kelas 11, dan September 2002 untuk kelas 12. Kurikulum ilmu sosial Ontario, yang meresmikan kursus kewarganegaraan wajib untuk semua siswa kelas sepuluh pada tahun 2000, sangat preskriptif, memberikan rencana pelajaran dan kegiatan penilaian. Mata pelajaran biasanya dikoordinasikan di dalam departemen bidang subjek sehingga semua guru dengan mata pelajaran yang sama menggunakan silabus yang sama, walaupun kurikulumnya kurang kaku untuk mata pelajaran pilihan (Myers, 2007: 4-5).

Kurikulum Umum di Ontario (*Ontario Ministry of Education* dalam Sears & Hughes, 1996: 131) mengajak siswa untuk mengembangkan keterampilan partisipasi dari kelas utama sampai mereka melakukan hal-hal seperti: mengidentifikasi dan melakukan pelayanan di komunitas sekolah atau di rumah dan mengevaluasi pengalaman, mengembangkan dan berpartisipasi dalam suatu kegiatan yang berkaitan dengan isu global dan / atau lingkungan serta mengevaluasi dampaknya. Sayangnya, komitmen retorika terhadap Pendidikan Kewarganegaraan ini hampir tidak pernah sesuai dengan sumber daya yang kompeten untuk memberlakukannya secara substansial. Seperti di banyak yurisdiksi, fokus yang meluas pada melek huruf dan berhitung telah menyebabkan penyempitan kurikulum, mendorong banyak mata pelajaran lain, termasuk peminggiran Pendidikan Kewarganegaraan (Peterson et.al, 2016: 74)

Dukungan kuat terhadap program Pendidikan Kewarganegaraan umumnya terlepas dari ideologi politik atau partisan. Misalnya, ketika Ontario menerapkan mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan wajib untuk siswa kelas 10 di awal tahun 2000an, semua pihak memainkan peran dan mendukung (Bell, 2015: 159). Meskipun demikian terdapat beberapa faktor yang harus dipertimbangkan saat menilai efektivitas kurikulum Pendidikan Kewarganegaraan di Ontario. Sistem pendidikan secara keseluruhan mencerminkan dualitas yang saling bertentangan karena struktur sosial memiliki sedikit pilihan selain bersaing secara internal maupun secara eksternal (kolaboratif) (Jonathan, 1997: 75). Dengan menempatkan kebutuhan individu di depan keseluruhan yang lebih besar, siswa kehilangan kepentingan mereka dalam kohesi kolektif. Dualitas ini dimainkan di kelas saat seorang guru memberi tanda dan siswa membandingkan satu sama lain untuk melihat bagaimana kinerjanya. Perlunya dualitas yang bertentangan ini untuk membuat Pendidikan Kewarganegaraan lebih menarik.

Aspek penting lainnya yang harus dipertimbangkan saat menilai keefektifan kurikulum Pendidikan Kewarganegaraan di Ontario adalah persepsi bahwa orang-orang Kanada tidak memiliki

kesadaran nasional yang inheren. Akibatnya masyarakat secara terus-menerus, dan secara sadar, berjuang untuk mendefinisikan apa artinya menjadi orang Kanada. Akibatnya, sekolah-sekolah Kanada dengan sengaja, dan sampai batas tertentu secara tidak sengaja, memilih untuk mempromosikan nasionalisme Kanada dengan mengorbankan siswa untuk mengeksplorasi dinamika bagaimana mereka mempengaruhi dan berinteraksi dengan masyarakat. Alter (1994: 12) berpendapat bahwa perkembangan kesadaran nasional kelompok sosial menekankan berbagai kesamaan yang disebut sebagai bahasa, budaya, agama, cita-cita politik, sejarah dan menurunkan ikatan politik atau agama lokal atau universal lainnya yang mungkin mengurangi persatuan mereka. Kode Etik Ontario menyatakan bahwa "siswa harus diperlakukan dengan hormat dan bermartabat". Artinya mereka harus menunjukkan rasa hormat kepada diri sendiri, orang lain dan tanggung jawab kewarganegaraan melalui perilaku yang dapat diterima dan diakui dalam undang-undang terkait.

Menurut Myers (2007: 8) para guru Toronto menyusun isi kurikulum studi sosial seputar pemahaman kewarganegaraan sebagai persiapan untuk hidup dalam masyarakat multikultural yang beragam. Sementara semua guru mendiskusikan multikulturalisme sebagai isu kurikuler yang penting, mengkonseptualisasikannya secara berbeda, baik menyoroti isu keadilan atau toleransi orang dari berbagai kelompok etnis. Penekanan ini dilakukan dengan tidak menghalangi kepentingan politik lainnya, seperti kelas sosial, gender, dan orientasi seksual. Menurut Schweisfurth (2006: 49) pemerintah Ontario tahun 1999 mengemukakan tujuan khusus dari Pendidikan Kewarganegaraan dalam Konteks Global, antara lain sebagai berikut.

- 1) Menganalisis krisis atau masalah kontemporer yang penting secara internasional (misalnya kesehatan dan Kesejahteraan, bencana, hak asasi manusia, pembangunan ekonomi, kualitas lingkungan)
- 2) Ringkasan hak dan tanggung jawab kewarganegaraan dalam konteks global;
- 3) Penelitian dan merangkum tindakan warga negara dari individu dan non-pemerintah Organisasi (LSM) yang telah membuat perbedaan dalam urusan global;
- 4) Membandingkan kontribusi individu, seperti yang dieksplorasi dalam ringkasan siswa, hingga sampai pada definisi istilah 'warga global'

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa Pendidikan Kewarganegaraan di Ontario menjadi salah satu mata pelajaran wajib yang harus diterapkan dalam kurikulum sekolah khususnya pada kelas X. Pendidikan Kewarganegaraan di Ontario diintegrasikan ke dalam studi sosial yang mengajak siswa untuk mengembangkan keterampilan partisipasi dari kelas utama sampai mereka melakukan hal-hal seperti: mengidentifikasi dan melakukan pelayanan di komunitas sekolah atau di rumah dan mengevaluasi pengalaman, mengembangkan dan berpartisipasi dalam suatu kegiatan yang berkaitan dengan isu global dan / atau lingkungan dan mengevaluasi

dampaknya. Provinsi Ontario menyatakan bahwa PKN kelas X melengkapi pemahaman siswa tentang peran individu dalam masyarakat dengan mengajarkan prinsip-prinsip dasar demokrasi dan kewarganegaraan yang bertanggung jawab. Pedoman kurikulum Ontario menjelaskan tiga alur utama Pendidikan kewarganegaraan: kewarganegaraan informasi, Kewarganegaraan terarah, dan, kewarganegaraan aktif .

Struktur Kurikulum Pendidikan Kewarganegaraan di Saskatchewan

Provinsi Saskatchewan memiliki fokus yang signifikan terhadap pendidikan penduduk Aborigin. Pada tahun 2014 di Provinsi Saskatchewan mulai melakukan upaya untuk menerapkan kurikulum Pendidikan Kewarganegaraan yang komprehensif di sekolah-sekolah. Dokumen formal yang berjudul *"Rights, Responsibilities and Respect: Enduring Understanding for Citizenship Education"* menetapkan kebutuhan akan kurikulum Pendidikan Kewarganegaraan dalam kewarganegaraan vakum yang mewujudkan dirinya di seluruh sistem demokrasi di seluruh dunia (Tupper, 2014: 87). Namun demikian, kebijakan tersebut tidak menempatkan kewarganegaraan dalam konteks kolonial atau meminta siswa untuk mempertimbangkan tentang pengalaman kewarganegaraan yang berbeda dari orang-orang Kanada dari waktu ke waktu dan tergantung pada lokasi sosial mereka. Sebaliknya, pendekatan hak dan tanggung jawab dalam kurikulum ini mengarahkan kembali untuk memperkuat pertimbangan kewarganegaraan yang dominan, dan dapat dipahami sebagai respons terhadap penurunan bentuk partisipasi masyarakat tradisional dan untuk memusatkan kembali kepentingan mereka pada pendidikan kewarganegaraan.

Potensi untuk memajukan konstruksi kewarganegaraan yang dominan, mempengaruhi cara orang muda memahami dan menegosiasikan identitas sipil mereka. Bennet (2008:8) berpendapat bahwa kurikulum kewarganegaraan sering dilucuti dari peluang independen bagi kaum muda untuk merangkul dan mengomunikasikan tentang politik dengan istilah mereka sendiri. Bennet melanjutkan dengan menyatakan bahwa di sekolah-sekolah, pendidikan kewarganegaraan tradisional telah menciptakan keterputusan antara siswa dan keterlibatan mereka dalam demokrasi. Menurut Arthur et.al (2008: 126) secara bersamaan, Provinsi Saskatchewan menggambarkan "tujuan akhir pendidikan studi sosial yaitu siswa yang memiliki rasa sebagai peserta aktif dan warga dunia yang saling bergantung" .

Para peneliti menggambarkan satu pendekatan "kewarganegaraan yang bertanggung jawab" yang berfokus pada pelaksanaan hak dan tanggung jawab individu, sementara kewarganegaraan partisipatif memerlukan pendekatan yang lebih terlibat dan melibatkan. Konseptualisasi kewarganegaraan berorientasi keadilan, melibatkan kritik dan pendekatan kritis yang lebih berkelanjutan untuk memahami struktur politik dan sosial, berbeda dengan wacana dominan yang

sering beredar dalam kurikulum dan praktik pengajaran. Westheimer & Kahne (2004: 6) menemukan pendekatan yang paling sering digunakan untuk pendidikan kewarganegaraan berorientasi pada keadilan, dengan para guru lebih memilih untuk mengambil pendekatan pribadi yang bertanggung jawab dan partisipatif di kelas mereka. Inti dari kurikulum yang diusulkan oleh Saskatchewan adalah pengembangan warga negara yang secara aktif menyelidiki dan menafsirkan hak dan tanggung jawab mereka sebagai warga negara Kanada yang berpartisipasi dalam demokrasi. Berdasarkan fokus pada keterlibatan warga, belajar seumur hidup, rasa diri yang kuat dalam komunitas yang dapat meningkatkan model kewarganegaraan pribadi dan partisipatif. Gill & Sears (2010:193) berpendapat bahwa komponen kunci kewarganegaraan di negara manapun adalah identifikasi orang-orang terhadap bangsa. Di negara-negara demokrasi liberal seperti Kanada, kewarganegaraan dapat dipahami sebagai etika nasional, di mana hak-hak individu dan partisipasi masyarakat dihargai.

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa upaya komprehensif dalam mengimplementasikan Pendidikan Kewarganegaraan dalam kebijakan kurikulum di Provinsi Saskatchewan mulai dilakukan pada tahun 2014. Pendekatan kurikulum Pendidikan Kewarganegaraan di Saskatchewan menggunakan pendekatan hak dan tanggung jawab yang mengarahkan kembali penguatan terhadap pertimbangan kewarganegaraan yang dominan dan sebagai respon terhadap penurunan bentuk partisipasi masyarakat tradisional serta jalan untuk memusatkan kembali kepentingan mereka pada Pendidikan Kewarganegaraan. Inti kurikulum Pendidikan Kewarganegaraan di Provinsi Saskatchewan adalah pengembangan warga negara yang secara aktif menyelidiki dan menafsirkan hak dan tanggung jawab mereka sebagai warga negara Kanada yang berpartisipasi dalam demokrasi. Hal ini berfokus pada keterlibatan warga negara dan rasa diri yang kuat dalam komunitas.

Struktur Kurikulum Pendidikan Kewarganegaraan di British Columbia.

Pendidikan Kewarganegaraan di British Columbia, mengalami pergeseran yang menarik yaitu dengan adanya kewarganegaraan global yang baru-baru ini tertanam dalam kurikulum enam studi sosial pada tahun 2006. Berdasarkan judul "Kanada dan Dunia," siswa diminta untuk mengembangkan keterampilan dan sikap yang diperlukan untuk menjadi peserta aktif yang bijaksana dalam komunitas mereka dan sebagai warga global (British Columbia Ministry of Education dalam Leduc, 2013: 395). Mengacu pada tujuan tersebut, siswa diminta untuk mempelajari hak dan tanggung jawab individu serta kolektif, organisasi internasional, dan untuk membuat perbandingan antara masyarakat Kanada dan asing, pemerintah, ekonomi, teknologi, dan kualitas kehidupan. Siswa-siswa juga diharuskan merancang dan menerapkan proyek partisipasi aktif yang berfokus pada isu lokal atau global.

Sebelum tahun 1930, Pendidikan Kewarganegaraan diintegrasikan ke dalam sejarah. Pendidikan kewarganegaraan mengajarkan siswa sebuah cerita asimilasi, "*nation building*" tentang Kanada yang bertujuan untuk mengembangkan patriotisme dan pengetahuan tentang struktur dan proses pemerintahan dalam rangka mengembangkan "kewarganegaraan yang baik" (Broom, 2017: 18). Jenkins (Broom, 2017: 18) menyatakan bahwa kurikulum British Columbia tahun 1919 mengintegrasikan Pendidikan Kewarganegaraan dalam pelajaran sejarah. Pendidikan Kewarganegaraan ini menggambarkan struktur dan proses dari pemerintah serta tanggung jawab warga negara "aktif" dalam voting, bergabung dalam sebuah partai politik, pencegahan praktik korupsi di pemerintahan. Pada tahun 1930, studi sosial dilaksanakan. Pendidikan kewarganegaraan diintegrasikan ke dalam studi sosial). Pada tahun 1950-an reaksi terhadap progresivisme, dan advokasi nilai-nilai tradisional, serta Perang Dingin dan Sputnik menyebabkan kekhawatiran bahwa siswa tidak dipersiapkan dengan baik untuk bersaing dengan Uni Soviet dan menghasilkan pembebasan panduan kurikulum baru pada tahun 1968. Berfokus sama pada sejarah dan pendidikan geografi dengan menggunakan struktur teori diseterilin Bruner. Pendidikan kewarganegaraan kurang mendapat perhatian langsung, dengan fokus menjadi *inquiry based learning*.

Perkembangan sosial dengan meningkatnya keragaman kultural dan perubahan ekonomi memungkinkan revisi kurikulum pada tahun 1985. Salah satu tujuan revisi pada kurikulum adalah membentuk warga negara yang baik. Panduan kurikulum tersebut mengemukakan isi yang sama mengenai struktur dan proses politik (pemerintahan) dan hukum, dengan perhatian lebih pada multikulturalisme, hak asasi manusia, geografi global dan saling ketergantungan, serta pengembangan keterampilan yang sebagian besar terdapat dalam pendidikan sejarah sosial. Pada akhir abad ke-20, dilakukan revisi kembali terhadap kurikulum. Tujuan sosial dari mata pelajaran sosial diulang kembali dan sedikit konten kewarganegaraan yang termasuk dalam kurikulum yang sebagian besar masih bersifat sejarah. Kurikulum sejarah sekali lagi dirubah pada tahun 1982 dan 1984, dengan penekanan progresif pada sejarah sosial baru pada akhir abad ke-20. Dengan demikian, karena pendidikan kewarganegaraan atau kewarganegaraan berdiri sendiri maka sejarah sosial juga memberikan penekanan pada isu-isu politik, pemerintahan, dan topik terkait lainnya yang penting untuk pengajaran Pendidikan Kewarganegaraan.

Leduc (2013: 395) mengemukakan bahwa istilah "warga global" dan "partisipasi aktif" terdapat dalam kurikulum studi sosial sejak tahun 2006, tetapi tidak ada definisi partisipasi aktif atau kewarganegaraan global dalam dokumen kurikulum, sehingga memungkinkan banyak penafsiran istilah-istilah ini oleh para guru. Akibat dokumen kurikulum tidak memberikan definisi untuk membimbing pengajaran guru, dan karena guru British Columbia memiliki otonomi untuk memilih sumber pengajaran pribadi maka mereka merancang pelajaran mereka sendiri.

Kementerian Pendidikan menguraikan kualitas lulusan sekolah tinggi dengan kriteria sebagai berikut: warga negara bertanggung jawab secara sosial dengan prinsip peduli, menghargai keragaman semua orang dalam hak orang lain untuk memiliki gagasan dan keyakinan yang berbeda, bertindak sesuai dengan undang-undang (Atrhur, dkk., 2008: 126).

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa kurikulum Pendidikan Kewarganegaraan di British Columbia mengalami perkembangan pada setiap rezimnya. Pendidikan Kewarganegaraan di Britis Columbia yang pada awalnya diintegrasikan dalam sejarah kemudian mengalami pergeseran dengan dintegrasikannya ke dalam mata pelajaran studi sosial. Setelah abad 20 tujuan dari mata pelajaran sosial direvisi dengan penekanan progresif pada sejarah sosial baru pada akhir abad ke-20 yang memberikan penekanan pada isu-isu politik, pemerintahan, dan topik terkait lainnya yang penting untuk pengajaran Pendidikan Kewarganegaraan. Kurikulum yang mendasarkan pada prinsip “Kanada dan Dunia” berimplikasi pada tujuan Pendidikan Kewarganegaraan yang mengajak siswa untuk mempelajari hak dan tanggung jawab individu serta kolektif, organisasi internasional, dan membuat perbandingan antara masyarakat Kanada dan asing, pemerintah, ekonomi, teknologi, dan kualitas kehidupan. Siswa-siswa juga diharuskan merancang dan menerapkan proyek partisipasi aktif yang berfokus pada isu lokal atau global.

SIMPULAN

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan beberapa aspek yang berkaitan dengan struktur kurikulum Pendidikan Kewarganegaraan di Kanada di tiga provinsi Kanada yaitu Ontario, Saskatchewan, dan British Columbia sebagai berikut.

1. Masyarakat Kanada yang multikultural memberikan penekanan terhadap bentuk implementasi Pendidikan Kewarganegaraan berbasis keragaman yang kewenangan implementasinya diserahkan padai tiap-tiap provinsi. Setiap provinsi di Kanada memiliki yurisdiksi berbeda dalam proses implementasi Pendidikan Kewarganegaraan yang pada akhirnya konsepsi kewarganegaraan dan Pendidikan Kewarganegaraan yang menjadi dasar kebijakan dalam kurikulum sekolah negeri Kanada merujuk pada aktivis di setiap akhir studi.
2. Pendidikan Kewarganegaraan di Ontario menjadi salah satu mata pelajaran wajib yang harus diterapkan dalam kurikulum sekolah khususnya pada kelas X. Pendidikan Kewarganegaraan di Ontario diintegrasikan ke dalam studi sosial yang mengajak siswa untuk mengembangkan keterampilan partisipasi dari kelas utama serta melakukan beberapa hal seperti mengidentifikasi dan melakukan pelayanan di komunitas sekolah atau di rumah dan mengevaluasi pengalaman, mengembangkan dan berpartisipasi dalam suatu kegiatan yang berkaitan dengan isu global dan / atau lingkungan dan mengevaluasi dampaknya. Pedoman kurikulum Ontario menjelaskan tiga

alur utama Pendidikan kewarganegaraan: kewarganegaraan informasi; Kewarganegaraan terarah; dan, kewarganegaraan aktif .

3. Pendekatan kurikulum Pendidikan Kewarganegaraan di Saskatchewan menggunakan hak dan tanggung jawab yang mengarahkan kembali penguatan terhadap pertimbangan kewarganegaraan yang dominan dan sebagai respon terhadap penurunan bentuk partisipasi masyarakat tradisional serta jalan untuk memusatkan kembali kepentingan mereka pada Pendidikan Kewarganegaraan. Inti kurikulum Pendidikan Kewarganegaraan di Provinsi Saskatchewan adalah pengembangan warga negara yang secara aktif menyelidiki dan menafsirkan hak dan tanggung jawab mereka sebagai warga negara Kanada yang berpartisipasi dalam demokrasi.
4. Pendidikan Kewarganegaraan di Britis Columbia yang pada awalnya diintegrasikan dalam sejarah kemudian mengalami pergeseran dengan dintegrasikannya ke dalam mata pelajaran studi sosial. Tujuan Pendidikan Kewarganegaraan di British Columbia memerintahkan siswa untuk mempelajari hak dan tanggung jawab individu serta kolektif, organisasi internasional, dan membuat perbandingan antara masyarakat Kanada dan asing, pemerintah, ekonomi, teknologi, dan kualitas kehidupan. Siswa-siswa juga diharuskan merancang dan menerapkan proyek partisipasi aktif yang berfokus pada isu lokal atau global.

DAFTAR PUSTAKA

- Alter, P. (1994). *Nationalism*. Bristol: J W Arrowsmith.
- Arthur, J., Ian, D., & Carole, H. (2008). *The sage handbook of education for citizenship and democracy*. Los Angeles: Sage.
- Banks, J.A (Ed). (2012). *Encyclopedia of diveristy in education*. California: Sage.
- Bell, S.,& Lewis, J.P. (2015).The Place of Civic Engagement in Introductory Canadian Politics and Government Courses. *Journal of Political Science Education*, 11(2), 157–173.<http://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/15512169.2014.947421?journalCode=upse20>
- Bell, S. (2015). A Survey of Civic Engagement Education in Introductory Canadian Politics Courses. *Te Canadian Journal for the Scholarship of Teaching and Learning*, 6(1), 1-19. http://ir.lib.uwo.ca/cgi/viewcontent.cgi?article=1203&context=cjsotl_rcacea
- Bennet,W.L (Ed). (2008). *Civic life online: learning how digital media can engage youth*. Cambridge, MA: The MIT Press
- Bickmore, K. (2014). Citizenship education in Canada: ‘Democratic’ engagement with differences, conflicts and equity issues?. *Citizenship Teaching & Learning*, 9(3), 257-278. DOI: 10.1386/ctl.9.3.257_1
- Broom. (2017). *Youth civic engagement in globalized world : citizenship education in comparative perspective*. New York: Palgrave Macmillan.
- Bull, B.L. (2008). A Politically Liberal Conception of Civic Education. *Studies in Philosophy and Education*, 27 (6) : 449-460.<https://link.springer.com/article/10.1007/s11217-008-9097-z>
- Connolly, W. E. (1974). *The terms of political discourse*. Lexington, KY: D. C. Heath

- Conley, M. W., & Osborne, K. (1983). Political education in Canadian schools: An assessment of social studies and political sciences courses and pedagogy. *International Journal of Political Education*, 6, 65–85. <https://eric.ed.gov/?id=EJ278696>
- Davies, I., & Issitt, J. (2005). Reflections on citizenship education in Australia, Canada and England. *Comparative Education*, 41:4, 389-410. <https://www.jstor.org/stable/30044552>
- Faden, L. (2012). Teachers constituting the politicized subject: Canadian and US teachers' perspectives on the "good" citizen". *Citizenship Teaching and Learning*, 7(2): 173–89. <http://www.ingentaconnect.com/contentone/intellect/ctl/2012/00000007/00000002/art00006>
- Gibson, S. (2012). Why do we learn this stuff?" Students views on the purpose of social studies. *Canadian Social Studies*, 45 (1) : 43–58. <https://eric.ed.gov/?id=EJ972852>
- Gill, A.R.J. & Sears, A (Eds). (2010). *Globalization, the nationstate and the citizen: dilemmas and directions for citizenship education*. New York : Routledge.
- Hebert, Y & Sears, A. (2001). *Citizenship education*. Canada: Canadian Education Assosiation.
- Hebert, Y. (2009). "Responsibility and citizenship education: shifting meanings, policy and curricula". *Citizenship Teaching and Learning*, 5(2): 4–15. https://s3.amazonaws.com/academia.edu.documents/6732602/5_2_final.pdf
- Jonathan, R. (1997). *Illusory freedoms: liberalism, education and the market*. Trowbridge: Blackwell.
- Kennelly, J., & Dillabough, J.A. (2008). "Young people mobilizing the language of citizenship: Struggles for classification and new meaning in an uncertain world." *British Journal of Sociology of Education*, 29 (5) : 493–508. <http://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/01425690802263643>
- Kennelly, J., & Llewellyn, K. (2011). Educating for active compliance: discursive constructions in citizenship education. *Citizenship Studies*, 15(6-7): 897–914. <http://www.tandfonline.com/doi/pdf/10.1080/13621025.2011.600103>
- Leduc, R. (2013). Global citizenship instruction through active participation: what is being learned about global citizenship?. *The Educational Forum*, 77 (4): 394-406. <http://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/00131725.2013.822038>
- Livingstone, D.W. (2015). Montreal & Kingston, Londong, Chicago: McGill-Queen' University Press.
- Llewellyn, K., Cook, S., & Molina, A. (2010). Civic learning: moving from the apolitical to the socially just. *Journal of Curriculum Studies*, 42(6): 791–812. <http://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/00220271003587400?journalCode=tcus20>
- Marker, G., & Mehlinger, H. (1992). Social studies. In P. W. Jackson (Ed.), *Handbook of research on curriculum*. New York: Macmillan
- Molina, L.A & Giron. (2016). Civics is largely about politics: the possibilities and challenges of a citizenship education pedagogy that embraces democratic politics and recognizes diversity. *International Journal of Multicultural Education*, 18 (1): 142-157. <https://eric.ed.gov/?id=EJ1104899>
- Myers, J.P. (2007). Citizenship education practices of politically active teachers in Porto Alegre, Brazil and Toronto, Canada. *Comparative Education Review*, 51(1) Vol. 51: 1-24. <http://www.jstor.org/stable/10.1086/508641>

- Peterson, A., Hattam, R., Zembylas, M., Arthur, J (Eds). (2016). *The palgrave international handbook of education for citizenship and social justice*. UK: Palgrave Handbooks.
- Peterson, A., Davies, I., Chong, E., Epstein, T., Peck, C., Ross, A., Sears, A., dos Santos Schmidt, M.A.M., Sonu, D. (2016). *Education, globalization and the nation*. New York: Palgrave Macmillan.
- Schweisfurth, M. (2006). Education for global citizenship: teacher agency and curricular structure in Ontario schools. *Educational Review*, 58 (1): 41-50. <http://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/00131910500352648?journalCode=cedr20>
- Sears, A.M. & Hughes, A.S. (1996). Citizenship education and current educational reform. *Canadian Journal Of Education*, 21(2): 123–142. <http://journals.sfu.ca/cje/index.php/cje-rce/article/view/2726/2030>
- Sears, A., & Parsons, J. (1991). Towards critical thinking as an ethic. *Theory and Research in Social Education*, 19, 45–68. <http://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/00933104.1991.10505627>
- Smith, B. O. & Ennis, R. B. (Eds). (1961). *Language and concepts in education*. Chicago: Rand McNally.
- Tupper, J., & Cappello, M. (2012). “(Re)Creating citizenship: Saskatchewan high school students’ understandings of the “good” citizen”. *Journal of Curriculum Studies*, 44(1) :37–59. <http://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/00220272.2011.618951>
- Tupper, J. (2014). “Social media and the idle no more movement: citizenship, activism and dissent in Canada.” *Journal of Social Science Education*, 13(4): 87-94. <http://www.jsse.org/index.php/jsse/article/view/1354>
- Tupper, J., Cappello, M., & Sevigny, P. (2010). Locating citizenship: curriculum, social class, and the good citizen. *Theory & Research in Social Education*, 38 (3) : 336-365. <http://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/00933104.2010.10473430>
- Westheimer, J. & Kahne, J. (2004). What kind of citizen? The politics of educating for democracy. *American Educational Research Journal*, 41(2): 237-269. <http://journals.sagepub.com/doi/abs/10.3102/00028312041002237>